

ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM (NAHDATUL ULAMA)

Oleh
Dr. Julhadi, MA¹
Nurasiah Ahmad, MA²

Abstrack

Nahdlatul 'Ulama (Kebangkitan 'Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan, berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya.

Kata Kunci : Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam

¹ Dosen STIT Syekh Burhanuddin

² Dosen STIT Syekh Burhanuddin

A. Pendahuluan

Secara Etimologi Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kata bahasa Arab, *Nahdlah* berarti bangkit, bangun, loncatan sedangkan *al Ulama* berarti kelompok agamawan. Sedangkan secara epistemologi, Nahdlatul Ulama adalah suatu komonitas cendikiawan (ulama) yang mampu menerima, melestarikan dan meneruskan tradisi dan budaya generasi sebelumnya serta mampu memberikan sesuatu yang lebih memberikan manfaat.

Sedangkan Nahdlatul Ulama dalam rumusan Khittah Nahdlatul Ulama dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhaluan salah satu dari madzhab empat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang bertaqwa. Dalam redaksi lain juga dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah jamiah diniah Islamiah berakidah Islam menurut ahlus

sunnah wal jamaah serta mengikuti salah satu madzhab empat.³

Nahdhatul Ulama (NU) adalah sebuah gejala yang unik, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia Muslim. Ia adalah sebuah organisasi ulaa tradisional yang mempunyai pengikut yang banyak jumlahnya, organisasi non pemerintahan ini yang paling besar yang masih bertahan dan melingkar dilakangan bawah . ia mewakili paling tidak dua puluh juta Muslim, yang meski tidak seluruh resmi menjadi anggota, akan tetapi merasa terikat kepadanya melalui kesetiaan-kesetiaan primordial.

Di sebuah daerah yang dilanda kecenderungan kuat kearah pemusatan, NU merupakan organisasi paling signifikan yang sangat terdesentralisasi. Berbicara tentang NU artinyamembicarakan suatu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Visi dan misi serta perjuangan NU baik sebelum kemerdekaan

³ Hilmy Muhammad Sulthan Fatoni, *Identitas Islam Indonesia.*,(Elsas, Jakarta : 2004), h 120 - 121

maupun setelah kemerdekaan RI telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap RI ini. Sehingga tidak heran warga NU, menjadi basis perebutan bagi partai-partai politik yang ada di Indonesia, setelah NU kembali perjuangan semula atau kembali ke khittah 1926. untuk mengetahui bagaimana pemikiran dan perjuangan NU di bidang politik akan dikemukakan di makalah yang singkat ini.

B. LATAR BELAKANG LAHIRNYA NU

Seringkali dinyatakan bahwa NU dilahirkan oleh kiai tradisonal yang menyangsikan posisi mereka terancam dengan munculnya Islam reformis yaitu pengaruh Muhammadiyah dan serikat Islam yang semakin luas, demikian menurut pendapat ini, telah memarginasikan kiai, yang sebelumnya merupakan satu-satunya pemimpin serta juru bicara komunitas muslim, dan ajaran kaum

pembaharu sangat melemahkan legitimasi mereka.⁴

Hasbullah menyampaikan Berdirinya NU sebagaimana yang dikutip dari Chairul Anam, NU merupakan reaksi terhadap gerakan reformasi dalam kalangan umat Islam Indonesia dan berusaha mempertahankan salah satu dari empat mazhab dalam masalah yang berhubungan dengan fiqh, mazhab hanafi, maliki, hambali dan syafi'i. sedangkan dalam I'tiqad NU berpegang pada aliran Ahlussunnah wal jama'ah sebagai ajaran yang murni sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat.⁵

Jauh sebelum lahir sebagai organisasi , NU telah ada dalam bentuk komunitas (jama'ah) yang diikat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karekter Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah. Wujudnya sebagai organisasi tidak lain adalah “penegasan formal dari mekanisme

⁴ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, LKS Yogyakarta, 1994, hal. 2

⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Raja grafindo Persada, Jakarta: 199, cet ke 3

informal para ulama sepaham”. Arti penting dibentuknya organisasi ini tidak lepas dari konteks waktu itu, terutama berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi jama’ah tradisional berhadapan dengan arus paham pembaharuan Islam, yang ketika itu telah terlembagakan, antara lain dalam Muhammadiyah.⁶

Masuknya paham pembaharuan ke Indonesia diawali oleh semakin banyaknya umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke Tanah suci, sejak dibukanya Terusan Suez (1869). Bersamaan dengan itu, di Timur Tengah sedang merebak ajaran pembaharuan dan purifikasi ajaran Islam, seperti gerakan pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikenal sebagai Gerakan atau Paham Wahabiyah, maupun pemikiran Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afgani yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Abduh. Tak pelak, kontak pemikiran intensif antara jama’ah haji

⁶ A. Gafar Karim, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia*, cet, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 47

Indonesia dengan paham pembaharuan ini berlangsung. Oleh karenanya, ketika kembali ke Tanah Air, para jamaah haji membawa pemikiran itu untuk memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap dari tradisi di luar Islam.⁷

Tidak semua kalangan menerima paham pembaharuan itu secara bulat-bulat. Sekelompok ulama pesantren (yang nota bene juga haji) menilai bahwa penegakan ajaran Islam secara murni tidak selalu berimplikasi perombakan total terhadap tradisi lokal.⁸ Tradisi ini bisa saja diselaraskan dengan ajaran Islam secara luwes. Kalangan yang dikenal sebagai kelompok tradisionalis ini mengamati upaya purifikasi ajaran Islam itu dengan cemas. Sebab tidak mustahil jika hal itu dilakukan secara frontal dan radikal akan munggunccang keyakainan masyarakat. Terlebih lagi, upaya itu ternyata mulai berindikasi pendrobakan taradsisi keilmuan yang selama ini dianut oleh para ulama pesantren

⁷ *Ibid.*, hlm. 47-48

⁸ *Ibid.*, hlm. 48

Kelahiran NU melalui suatu proses yang sangat panjang sebelumnya. Bermula dari munculnya gerakan nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya Serikat Islam (SI) telah mencetak beberapa pemuda alumni pesantren yang bermukim di Makkah untuk mendirikan cabang perhimpunan itu di sana. Sebelum sempat berkembang mereka segera kembali ke tanah air karena pecah perang dunia ke-II. Namun rencana mereka masih tetap melanjutkan setelah mereka menetap di tanah air. Mereka mendirikan Nahdatul Wathan (1914), Taswir al-Askar (1918). Setelah itu di Surabaya didirikan penghimpunan local yang serupa antara lain adalah Perikatan Wataniyah Ta'mir al-Masajid dan Atta'dibiyah.⁹

Ketegangan dalam kongres al-Islam sepanjang paruh pertama tahun dua puluhan dan berlanjut dalam sidang-sidang Komite Khilafat, telah mendorong penghimpunan lokal di

⁹ M.Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1994, hal. 314

Surabaya itu turut serta mendirikan organisasi baru yang luas dan berskala nasional. Mereka menilai perhimpunan-perhimpunan umat Islam yang ada maupun kongres al-Islam sendiri tidak bersikap akomodatif terhadap visi yang mereka coba kembangkan. Kemudian ketegangan tersebut berlanjut setelah delegasi yang dikirim ke kongres Makkah pada tahun 1926 ternyata mengabaikan kepentingan-kepentingan yang mereka kembangkan. Mereka kemudian mengirimkan delegasi sendiri sendiri ke Makkah. Untuk kepentingan itu mereka mendirikan perhimpunan baru NU.¹⁰

Namun peristiwa itu hanyalah lintasan proses sejarah dari suatu pergumulan sosial cultural yang panjang. Lembaga pendidikan pesantren yang dikembangkan para ulama telah merintis arah dengan visi keagamaan yang kuat. Jika kemudian mereka membentuk ikatan sosial yang lebih formal, tujuan pokoknya adalah

¹⁰ Ibid

seperti lembaga pesantren itu, yaitu ingin menegakkan kalimat Allah. Visi ini kemudian dikemangkan dengan rumusan yang lebih operasional yang disebut jihad fi sabilillah.¹¹

Jihad mengandung arti yang sangat luas. Dalam arti yang ekstrem jihad berarti perang, tetapi juga berarti, hal-hal dalam keseharian serta menjawab salam atau merawat jenazah.¹² Jihad sebagai kewajiban kolektif (kifayah) bukanlah tujuan, melainkan instrumen atau wasilah. Tujuan perang pada hakikatnya adalah menyampaikan petunjuk, karena hal itu jika dapat dilakukan dengan cara lain yang resiko negatifnya lebih kecil dan manfaatnya jauh lebih besar, seperti dengan cara persuasi, pendidikan, atau perbaikan ekonomi, lebih baik dilakukan tanpa perang.¹³

Dalam konteks ini dapat dipahami perjalanan NU selanjutnya. Melalui pesantren

¹¹ Ibid

¹² Lihat; Abu Bakar ad-Dimyati, I'ānah at-Talihin, juz IV, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, al-Qahirah, tt, hal.180-184

¹³ Ibid

para ulama mengemban tugas melaksanakan jihad untuk menegakkan kalimah Allah. Setelah dirasakan perlunya mengembangkan lembaga tradisional ini dan cultural yang telah hidup ditengah masyarakat kearah bentuk yang lebih formal dengan visi yang lebih luas, maka didirikan organisasi keamaan sebagai tugas untuk mengantisipasi tugas tersebut NU merupakan salah satu wujud dari upaya itu. Di mulai dari pesantren para ulama muda, pesantren merintis kegiatan-kegiatan mereka. Dari perhimpunan keagamaan seperti Nahdlatul Wathan, Taswir al-Afkar kemudian NU (Nahdlatul Ulama). Hanya satu cita-cita mereka adalah untuk merencanakan tanah air merdeka,¹⁴ dan cita-cita untuk menempatkan syari'ah sebagai bagian hidup dari kebangsaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motif utama yang mendasari gerakan para ulama membentuk NU adalah motif keagamaan

¹⁴ Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan Kiai Wahab Chasbullah*, Penerbit Baru, Bandung, 1970, hal. 24-34

sebagai Jihad fi sabilillah. Kedua adalah tanggung jawab mengembangkan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan pelestarian ajaran mazhab Syafi'i. Ini berarti tidak statis, tidak berkembang, sebab pengembang yang dilakukan berfokus pada kesejahteraan sehingga pemikiran yang dikembangkan itu memiliki konteks sejarah. Ketiga, dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan sosial dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan pembentukan nahdlatul Watahn, Taswir al-Afkar, Nahdlatul Tujjar, dan Ta'mir al-Masajid sedangkan yang keempat adalah motif politik yang ditandai dengan semangat nasionalisme ketika pendiri NU itu mendirikan cabang SI di Makkah serta obsesi hari depan tanah air merdeka bagi umat Islam.

Selain latar belakang di atas, sumber lain mengatakan kelahiran NU sebagai reaksi atas pembaharuan pemikiran Islam di Jawa, dengan sebab ini berdirilah NU pada tahun 1926. adapun sebab-sebab berdirinya organisasi ini sekurang-

kurangnya ada dua,¹⁵ yaitu: pertama, seruan terhadap penguasa Arab Saudi, Ibnu Saud, untuk meninggalkan kebiasaan beragama menurut tradisi. Golongan tradisi ini tidak menyukai Wahabisme yang sedang berkembang di Hijaz, karena itu mereka membentuk komite Hijaz yang kemudian berubah menjadi Nahdlatul Ulama dalam sebuah rapat di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926.

Adanya sebab kedua, adalah ketika itu pembaharuan Islam di Jawa sedang giat-giatnya yang dipelopori oleh Muhammadiyah dan persis dengan pimpinan tiga tokoh yaitu, K.H.Mas Mansur, Fakhir Hasyim dan K.H.Ahmad Dahlan. Selama ini pemikiran golongan tradisi selalu bertentangan dengan golongan pembaharu, seperti dalam pengucapan ushali dan kurikulum pengajaran sekolah. Apalagi yang mewakili umat

¹⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1980, hal. 242-250

Islam Indonesia dalam kongres Islam pertama di Makkah adalah dari golongan pembaharu.¹⁶

Pendiri resminya adalah Hadratus Syeikh KH. M. Hasyim Asyari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah KH. Abdul Wahab Chasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas, Jombang. Kiai Wahab adalah salah seorang murid utama Kiai Hasyim. Ia lincah, energik dan banyak akal. Susunan pengurus PBNU yang pertama (1926) :

Rais Akbar : KH. M. Hasyim Asy’ari (Jombang)

Wakil rais Akbar : KH. Dahlan Ahyad,

Kebondalem (Surabaya)

Katib Awal : KH. Abdul Wahab Chasbullah

(Jombang)

Katib Tsani : KH. Abdul Chalim (Cirebon)

¹⁶ Dalang kongres pertama tersebut, Indonesia diwakili oleh H.O.S.Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansur (Muhammadiyah).

A'wan : KH. Mas Alwi Abdul Aziz (Surabaya)

: KH. Ridwan Abdullah (Surabaya)

: KH. Said (Surabaya)

: KH. Bisri Syansuri (Jombang)

: KH. Abdullah Ubaid (Surabaya)

: KH. Nahrowi (Malang)

: KH. Amin (Surabaya)

: KH. Masykuri (Lasem)

: KH. Nahrowi (Surabaya)

Mustasyar : KH. R. Asnawi (Kudus)

: KH. Ridwan (Semarang)

: KH. Mas Nawawi, Sidogiri (Pasuruan)

: KH. Doro Muntoho (Bangkalan)

: Syeikh Ahmad Ghonaim al-Misri (Mesir)¹⁷

¹⁷ Abu Su'ud, *Islamologi Sejarah, Ajaran dan Peranannya dan Perdaban Umat Manusia*, (Rineka Cipta, Jakarta: 2003), h.252.

Organisasi Nahdltul Ulama' didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali).¹⁸ Sebelum menjadi partai politik NU bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam.

Demikianlah beberapa histories latar belakang berdirinya NU sebagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia, yang dalam sejarah perjalanan pernah menjadi partai politik, lalu kembali ke khittah 1926, sampai sekarang. Sekalipun pada masa reformasi membidangi lahirnya beberapa partai politik Islam, namun NU tetap menjadi organisasi sosial keagamaan dan

lihat juga tentang susunan kepengurusan NU dalam buku karangan Mahmud Junus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Hidakarya Agung, Jakarta: 1979), h, 239-240

¹⁸ Mahmud Junus, *ibid*

tidak menjadi partai politik. Beridirinya NU merupakan bentuk kepedulian umat Islam terhadap keberlangsungan ajaran Islam itu sendiri terutama ulama yang sangat khawatir dan cemas terhadap gejolak dan suhu perpolitikan di dunia Islam, mereka merasa terpanggil untuk membentuk suatu wadah yang bisa menjembatani umat dalam mewujudkan Ajaran Islam sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nabi. Namun dalam perjalannya mulai dari dirintisnya bukan tidak mengalami pasang surut, terbukti dengan bergabungnya NU dalam pengumpulan partai politik dan lain sebagainya. Seakan-akan bergeser dari tujuan yang sesungguhnya.

C. PEMIKIRAN DAN GERAKAN NU

Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan yang berhaluan Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah,¹⁹ sebagai wadah

¹⁹ Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah pada hakekatnya adalah ajaran Islam yang sebenarnya, seperti yang diajarkan dan daiamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Oleh

pengembangan dan mengamalkan ajaran Islam Ala Ahadi al-Mazhabi al-Arba'ah dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.²⁰ Dengan kata lain sebagai salah satu ormas tertua, NU merupakan satu-satunya organisasi masa yang secara keseluruhan bahwa Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah sebagai mazhabnya.²¹ Sehingga, ketika NU berpegang pada mazhab, berarti mengambil produk hukum Islam (fiqh) dari empat Imam Mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.²² Dalam kenyataan NU lebih condong pada pendapat Imam asy-Syafi'I,

karena itu Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah sudah timbul bersamaan dengan munculnya agama Islam sejak disampaikan syari'ah dan ajarannya oleh Rasulullah SAW. Jadi, golongan Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah adalah golongan pengikut setia ajaran yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran*, hlm 39.

²⁰ Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Mukhtamar XXX Nahdhatul Ulama* (Jakarta: Sek. Jen. PBNU, 1999), hlm.23

²¹ Mohamad Shodik, *Gejolak Santri Kota: Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 86.

²² Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, cet. I (Yogyakarta: LPPI, 2000), hlm. 58.

oleh karenanya NU sering “dicap” sebagai penganut fanatik mazhab Syafi’i. Hal ini dapat dilihat dari cara NU mengambil sebuah rujukan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Alasan yang sering dilontarkan adalah umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafi’i.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam’iyah Diniyah Islamiyah yang bertujuan membangun atau mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT senantiasa berpegang teguh pada kaidah-kaidah keagamaan (ajaran Islam) dan kaidah-kaidah fiqh lainnya dalam merumuskan pendapat, sikap dan langkah guna memajukan jam’iyah tersebut. Dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan alam pikiran (pokok ajaran) Nahdlatul Ulama (NU) secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga bidang ajaran yaitu; bidang aqidah, fiqh, dan tasawuf.²³

²³ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik*, hlm. 80.
Lihat juga Mohamad Shodik, *Gejolak Santri Kota*, hlm. 97.

Dalam bidang aqidah yang dianut oleh NU sejak didirikan pada 1926 adalah Islam atas dasar Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah. Faham ini menjadi landasan utama bagi NU dalam menentukan segala langkah dan kebijakannya, baik sebagai organisasi keagamaan murni, maupun sebagai organisasi kemasyarakatan. Hal ini ditegaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)., bahwa NU mengikuti Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (mazhab). Adapun faham Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah yang dianut NU adalah faham yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.²⁴ Keduanya dikenal memiliki keahlian dan keteguhan dalam mempertahankan i'tiqad (keimanan) Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah seperti yang telah disyaratkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi dalam melaksanakan ajaran Islam, bila dikaitkan dengan masalah-

²⁴ *Ibid.*, hlm. 81

masalah aqidah harus memilih salah satu di antara dua yaitu al-Asy'ari dan al-Maturidi.

Sementara dalam bidang fiqh ditegaskan bahwa: Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah dan mengikuti faham salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Namun dalam prakteknya para Kyai adalah penganut kuat dari pada mazhab Syafi'i.²⁵

Jadi dengan demikian NU memegang produk hukum Islam (fiqh) dari salah satu empat mazhab tersebut—artinya bahwa dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, NU menganut dan mengikuti bahkan mengamalkan produk hukum Islam (fiqh) dari salah satu empat mazhab empat sebagai konsekuensi dari menganut faham Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah. Walaupun demikian tidak berarti terus Nahdlatul Ulama tidak lagi menganut ajaran yang diterapkan Rasulullah

²⁵ Mohamad Shodik, *Gejolak Santri Kota*, hlm. 97

SAW. sebab keempat mazhab tersebut dalam mempraktekkan ajaran Islam juga mengambil landasan dari al-Qur'an dan as-Sunnah di samping Ijma' dan Qiyas sebagai sumber pokok penetapan hukum Islam.²⁶

Adapun alasan kenapa Nahdlatul Ulama dalam bidang hukum Islam (fiqh) lebih berpedoman kepada salah satu dari empat mazhab;²⁷ Pertama, al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam yang pokok atau utama bersifat universal, sehingga hanya Nabi SAW. yang tahu secara mendetail maksud dan tujuan apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Nabi SAW sendiri menunjukkan dan menjelaskan makna dan maksud dar al-Qur'an tersebut melalui sunnah-sunnah beliau—yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan taqirir. Kedua, sunnah Nabi SAW. yang berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirirnya yang hanya diketahui oleh para sahabat yang hidup bersamaan (semasa) dengan beliau, oleh karena

²⁶ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad* hlm. 83

²⁷ *Ibid.*, hlm. 83-84

itu perlu untuk memeriksa, menyelidiki dan selanjutnya berpedoman pada keterangan-leterangan para sahabat tersebut. Namun sebagian ulama tidak memperbolehkan untuk mengikuti para sahabat dengan begitu saja. Maka dari itu untuk mendapatkan kepastian dan kemantapan, maka jalan yang ditempuh adalah merujuk kepada para ulama mujtahidin yang tidak lain adalah imam madzhab yang empat— artinya bahwa dalam mengambil dan menggunakan produk fiqh (hukum Islam) dari ulama mujtahidin harus dikaji, diteliti dan dpertimbangkan terlebih dahulu sebelum dijadikan pedoman dan landasan bagi Nahdhatul Ulama.

Oleh karena itu, untuk meneliti dan mengkaji suatu produk fiqh (hukum Islam) dalam NU ada suatu forum pengkajian produk-produk hukum fiqh yang biasa disebut “Bahsul Masail ad-Diniyah (pembahasan masalah-masalah

keagamaan)”.²⁸ Jadi dalam forum ini berbagai masalah keagamaan akan digodok dan diputuskan hukumnya, yang selanjutnya keputusan tersebut akan menjadi pegangan bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

Faham Nahdatul Ulama dalam bidang tasawuf. Tasawuf sebenarnya merupakan dari ibadah yang sulit dipisahkan dan merupakan hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan makna hakiki dari suatu ibadah. Jika fiqh merupakan bagian lahir dari suatu ibadah yang segala ketentuan pelaksanaannya sudah ditetapkan dalam agama, untuk mendalami dan memahami bagian dari ibadah, maka jalan yang dapat ditempuh adalah melalui tasawuf itu sendiri.

Di antara berbagai macam aliran tasawuf yang tumbuh dan berkembang, NU mengikuti aliran tasawuf yang dipelopori oleh Imam Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Gazali. Imam Junaid al-Bagdadi adalah salah seorang sufi terkenal yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

wafat pada tahun 910 M di Irak, sedangkan Imam al-Gazali adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia.

Untuk kepentingan ini, yaitu membentuk sikap mental dan kesadaran batin yang benar dalam beribadah bagi warga Nahdlatul Ulama, maka pada tahun 1957 para tokoh NU membentuk suatu badan “Jam’iyah at-Tariqah al-Mu’tabarrah” badan ini merupakan wadah bagi warga NU dalam mengikuti ajaran tasawuf tersebut. Dalam perkembangannya pada tahun 1979 saat muktamar NU di Semarang badan tersebut diganti namanya “Jam’iyah at-Tariqah al-Mu’tabarrah an-Nadiyyah”.²⁹ Dengan melihat nama badan tersebut di mana di dalamnya ada kata nadhiyyin ini menunjukkan identitasnya sebagai badan yang berada dalam lingkungan Nahdhatul Ulama.

Selanjutnya, sejalan dengan derap langkah pembangunan yang sedang dilakukan, maka

²⁹ *Ibid.*, hlm. 85

Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa harus mempunyai sikap dan pendirian dalam dan turut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Sikap dan pendirian Nahdlatul Ulama ini selanjutnya menjadi pedoman dan acuan warga NU dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Sikap NU dalam bidang kemasyarakatan diilhami dan didasari oleh sikap dan faham keagamaan yang telah dianut. Sikap kemasyarakatan NU bercirikan pada sifat: tawasut dan i'tidal, tasamuh, tawazun dan amar ma'ruf nahi munkar.³⁰ Sikap ini harus dimiliki baik oleh aktifis Nahdlatul Ulama maupun segenap warga dalam berorganisasi dan bermasyarakat:

1. Sikap Tawasut dan I'tidal.

Tawasut artinya tengah, sedangkan I'tidal artinya tegak. Sikap tawasuth dan i'tidal maksudnya adalah sikap tengah yang berintikan kepada

³⁰ *Ibid.*, hlm. 86-88.

prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama.³¹ Dengan sikap dasar ini, maka NU akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersikap membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatarruf (ekstrim).

2. Sikap Tasamuh.

Maksudnya adalah Nahdlatul Ulama bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan teruma hal-hal yang bersifat *furu'* atau yang menjadi masalah khilafiyah maupun dalam masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan.

3. Sikap Tawazun.

Yaitu sikap seimbang dalam berkhidmad. Menyesuaikan berkhidmad kepada Allah SWT, khidmat sesama manusia serta kepada lingkungan

³¹ Mohamad Shodik, *Gejolak Santri Kota*, hlm. 99

sekitarnya. Menserasikan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

4. Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Segenap warga Nahdlatul Ulama diharapkan mempunyai kepekaan untuk mendorong berbuat baik dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, serta mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan manusia.

Dengan adanya beberapa aspek tersebut di atas, diharapkan agar kehidupan umat Islam pada umumnya dan warga Nahdlatul Ulama pada khususnya, akan dapat terpelihara secara baik dan terjalin secara harmonis baik dalam lingkungan organisasi maupun dalam segenap elemen masyarakat yang ada. Demikian pula perilaku warga Nahdlatul Ulama agar senantiasa terbentuk atas dasar faham keagamaan dan sikap kemasyarakatan, sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang baik bagi agama maupun masyarakat.

Sejak pertama NU telah dihinggapi sebuah mitos politik. Para tokoh yang membidani kelahiran NU telah dibayangi sebuah obsesi tentang hari depan Indonesia yang merdeka. Ketika mereka mendirikan cabang SI di Makkah awal tahun belasan dan kemudian merintis beberapa organisasi sosial pendidikan dan usaha koperasi telah memperlihatkan kearah masa depan sebuah negeri yang merdeka, sebuah negeri yang umat Islamnya bebas melaksanakan syari'at agamanya.

Pada tahun 1926 NU ikut serta ambil bagian dalam sidang *Kantoor Voor Ilandsche Zaaken* di Jakarta yang membicarakan soal peraturan perkawinan umat Islam dan perbaikan organisasi penghulu. Atas inisiatif C.Gobee, adviseur pada kantor tersebut, pemerintah Hindia Belanda ingin memperbaiki peraturan tentang perkawinan umat Islam. Adapun peraturan yang direncanakan pada dasarnya mengatur tentang nikah, talak dan rujuk harus dilakukan menurut prosedur administrasi dan aturan hukum formal.

Dilaksanakan di depan penghulu, menyerahkan surat keterangan dari desa cukup umur (15 tahun) dan membayar biaya tertentu. Anak di bawah umur harus seizin Bupati dan pejabat yang terkait, dalam hal ini utusan SI tidak menyetujui rencana itu karena menurut pendapat mereka tidak perlu dilembagakan dalam rangka kenegaraan, utusan yang lain menyetujui rencana itu dengan variasi urusan tambahan yang tidak begiitu penting.³²

Pada tahun 1938 dalam Muktamar NU di Banjarmasin diputuskan bahwa Indonesia merupakan Dar al-Islam (negeri muslim).³³ dapatkah diterima? Padahal dalam kenyataan pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah Hindia Belanda yang kafir? Jawaban muktamar adalah karena mayoritas penduduk

³² Hadir dalam pertemuan itu antara lain; H.Muhammad Isa penghulu Serang, H. Abdul Siradji penghulu Pakualam Yogyakarta, H. Abdul Wahab, HBNO, H. Zamzam, Persis, HOS Tjokroaminoto dan lain-lain, Laporan Sidang Koo Voor Inlandsche Zaken di Jakarta, Suara NO, nomor 3 tahun 1929/346H

³³ Anonim, Ahkam al-Fuqaha, Thoa Putra, Semarang, 1960, hal. 61-62

negeri ini adalah beragama Islam dan umat Islam masih memiliki keleluasaan menjalankan syari'at agama mereka selain karena negeri ini pernah dipimpin oleh raja-raja muslim yang sebelumnya.³⁴

Diantara gerakan NU dalam perjalanannya adalah sebagai berikut:

1. Politik

Konsep politik dalam Islam sangat erat kaitannya dengan hukum, sebab salah satu yang penting dalam Islam mengharuskan adanya lembaga kekuasaan untuk menjalankan hukum itu. Atas dasar tersebut maka orientasi NU untuk memperjuangkan berlakunya hukum Islam di tanah air tidak bisa dilepaskan dengan lembaga kekuasaan politik, sebab dengan lembaga itu hukum Islam lebih dimungkinkan dapat difungsikan. Memang diakui ada elemen-elemen syari'at Islam yang tidak memerlukan perangkat lembaga kekuasaan politik, tetapi ada juga

³⁴ Ibid

elemen-elemen yang mengharuskan lembaga kekuasaan politik. Tentu saja dalam hal ini pada umumnya para pemuka Islam kemungkinan besar berpendapat sama, perbedaannya yang terletak pada elemen mana saja yang perlu dilembagakan dan mana yang tidak. SI misalnya sebelum perang pendapat soal perkawinan tidak perlu di atur oleh negara.³⁵ Terhadap hal yang kedua inilah , elemen syari'ah yang perlu dilembagakan, maka arah perjuangan NU terjun ke dalam dunia politik. Dari konsep perlunya hukum Islam dilembagakan dalam sistem sosial politik, maka selanjutnya NU terus memperjuangkan terciptanya lembaga politik itu.

Politik NU lebih kelihatan lagi dengan terbentuknya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) pada tanggal 21 September 1937.¹⁴ Keterlibatan NU dalam MIAI membawa perubahan orientasi para pemimpin NU dari masalah-masalah keagamaan dan sosial ke

³⁵ Suara NU, nomor 3, 1929

politik. Kendatipun seberapa besar kegiatan MIAI sejak berdiri sampai dengan berdirinya Masyumi pada tahun 1943 diwarnai agenda masalah keagamaan terbukti dengan keputusan-keputusan kongres yang diselenggarakan umumnya mengenai masalah keagamaan, namun suhu politik yang semakin memanas menjelang kemerdekaan sedikit banyak mendorong tokoh-tokoh NU ikut berperan.³⁶

Dukungan NU kepada Masyumi awalnya memang nampak bersemangat dengan seruannya kepada umat Islam untuk bergabung ke dalam Masyumi. Namun dalam kongres NU di Purwokerto tahun 1946 diserukan agar warga NU membanjiri Partai Politik praktis berupa distribusi kekuasaan menjadi ajang perebutan dan hal-hal lain yang menyangkut ketidaksepahaman kebijaksanaan politik menghadapi Belanda dalam perjanjian Linggar jati dan Renville. Keputusan

³⁶ Abu Bakar Atjeh (Ed), *Sejarah Hidup K.H.A.Wachid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Panitia Buku Peringatan, Jakarta, 1957, hal. 311

PSII mendirikan kembali partai tahun 1947 itu setelah dibekkan jepang sebelumnya dan NU keluar dari Masyumi tahun 1952 untuk sebagian juga dipengaruhi alasan-alasan ini, selain barang kali pertentangan lama ketika organisasi-organisasi Islam berselisih paham pada tahun 30-an yang muncul kembali.³⁷

Setelah NU keluar dari Masyumi dan menyatakan dirinya sebagai partai politik baru yang berdiri pada tahun 1952, tiga tahun kemudian NU harus bertarung dengan partai lain dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, dalam pemilu tahun ini NU berhasil mencapai prestasi empat besar, dengan mengumpulkan sebanyak 45 suara. Keberhasilan ini dinilai Alfian karena kemampuan NU menggalang solidaritas dikalangan kaum santri dan itu berarti memperjelas perjuangan mereka untuk memenangkan idiologi Islam dan sekaligus

³⁷ ibid

menunjukkan sikap anti komunis.³⁸ pada pemilu tahun 1955 ini kekuatan NU dan kaum santri sangat memegang peranan penting.³⁹

Pada masa Orde Baru, NU memperlihatkan dinamika sosial politik yang agak berlainan dengan masa sebelumnya. Dalam pemilu 1971 NU berhasil menduduki posisi kedua dibawah Golkar dan di atas Parmusi. Berdasarkan kebijakan Orde Baru, melakukan deparpolisasi dalam rangka pembentukan system kepartaian yang hegemonik. Setelah pemilu 1971 terjadilah fusi partai. NU bersama PSII, Perti, dan Parmusi yang kemudian berubah nama menjadi Muslimin Indonesia atau MI, pada tanggal 5 Oktober 1973 bersatu dengan Partai Persatuan Pembangunan.⁴⁰

Pada awal fusi kedudukan NU dalam PPPrelatif baik dari pada kedudukan mereka

³⁸ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 33

³⁹ Mahrus Irsyam, *Ulama dan Politik Upaya mengatasi Krisis*, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984, hal. 83-131

⁴⁰ M.Ali Haidar, *Op.Cit*, hal. 176-178

dalam Masyumi. Para kiyai/ulama NU lebih banyak duduk di majelis syura, sementara dari unsur MI menjadi eksekutif partai. Dalam perkembangan NU dan MI saling bersaing untuk mendduki pucuk pimpinan PPP. Puncaknya pada masa kepemimpinan H.J. Naro, banyak tokoh NU yang disingkirkan dari jajaran pengurus partai. Keadaan inilah yang membuat NU, lewat Mukhtar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Mengikrarkan kembali khittah 1926, kembali menjadi organisasi keagamaan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Setelah secara organisatoris meninggalkan pelanggan politik praktis, NU menjadi rebutan ketiga OPP. Sementara itu anggota NU yang merasa dirugikan oleh Naro melakukan aksi pengembosan terhadap PPP dalam pemilu 1987 sehingga perolehan suaranya turun. Dalam Mukhtar ke-28 tahun 1989 di Yogyakarta, khittah 1926 kembali dilakukan.⁴¹

⁴¹ Abdul Aziz Taba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal.2117

Namun pada masa reformasi, yaitu setelah Orde Baru tumbang, NU turut membidani beberapa partai politik Islam, misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nahdlatul Ummat (PNU), dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU).

Ditinjau dari segi perilaku politik selama ini, banyak pengamat menilai NU bersikap akomodatif dengan penguasa. Yang menjadi argumentasi adalah karena berubah-ubahnya sikap NU. Para pengamat politikpun tidak pernah menemukan titik temu dalam menganalisa perilaku politik NU. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut K.H.Abdurrahman Wahid (Gusdur), para pengamat NU hanya menyoroti salah satu atau dua aspek. Akibatnya mereka terjerumus pada aspek-aspek yang diutamakan dan tidak mengabaikan aspek-aspek lain yang sama pentingnya.⁴²

⁴² Abdurrahman Wahid “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia dewasa ini”. Prisma no 4 April 1984, hal.. 30-33, menurut Gusdur, ada empat hal yang saling berkaita yang harus dilihat dalam

Peristiwa dan kegiatan politik dianggap bagian integral dalam agama. Prilaku politik NU, apakah akomodatif atau radikal, diberikan pembenaran dalam agama, yaitu keabsahannya dimata hukum fiqih, inilah yang disebut dengan sub kultural NU. Konsekwensinta dengan prilaku politik NU diamati pula dengan pendekatan kultural. Sebab NU lahir sebagai sebuah paguyuban dengan sub kultural tersendiri. Sub kultural ini lahir dari sosialisasi ajaran-ajaran doktrin yang mereka yakini, pengalaman sejarahnya, dan pergumulan dengan sosio politik di sekitarnya.

Gerakan politik NU mencapai puncaknya ketika Abdurrahman Wahid (Gusdur), ketua NU, terpilih jadi orang nomor satu ditanah air ini masa bakti 1999-2004, mengalahkan rivalnya Megawati Sukarno Putri, ketua PDIP, yang merupakan partai pemenang pemilu 1999, yang

mengamati NU, yaitu (1) Tradisi Keilmuagamaan Ahlussunnah Wal-Jama'ah (2) Pandangan kemasyarakatan yang dimilikinya (3) Cara pengambilan keputusan umum dan (4) Proses rekonsialisasi internal jika timbul perbedaan tajam

semesti layak menjadi presiden secara demokratis, tetapi Megawati tidak terpilih akibat upaya politikus muslim di MPR.⁴³ Yang merasa tidak menyukai bila presidennya wanita, bahkan tidak memiliki kredibilitas. Hanya saja NU menjadi bahan pembicaraan, bahkan embel-embel kiyai/ulama, serta perannya mulai dipertanyakan, ketika Gusdur dilengserkan dengan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hal ini karena Gusdur simbol ulama NU yang kharismatik. Ini pukulan berat bagi NU secara khusus dan umat Islam Indonesia pada umumnya.

Dengan demikian perjalanan politik dari dulu sampai sekarang. NU mulai menyadari berbagai perjuangan di masa lalu, untuk itu sepertinya NU ingin membangun kembali kesadaran umatnya untuk menatap masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu NU,

⁴³ Politikus muslim itu seperti Amin Rais, ketua Umum PAN, Akbar Tanjung ketua Golkar, Hamzah Haz, ketua umum PPP, Yusril Ihzamahendra ketua umum PBB dan beberapa partai politik Islam lainnya

memberikan kebebasan kepada para warganya untuk membentuk dan memasuki partai politik yang praktis, namun secara lembaga NU tidak lagi memasuki wilayah politik praktis, kendatipun beberapa partai politik yang ada identiknya dengan NU, seperti PKB, PKU, PPNU dan lainnya.

2. Pendidikan

NU merupakan organisasi yang berbasis agama dan social serta pendidikan dan pengajaran dalam rangka memajukan masyarakat yang masih terbelakang disebabkan kurangnya pendidikan yang memadai pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh NU bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai akhlak yang mulia yang berbasiskan pondok pesantren.

Makanya ulamalah yang bertindak sebagai pengerak dalam bidang pendidikan ini, mereka bertindak sebagai guru, mengajarkan dan mempertahankan faham ahlussunnah. Akhir tahun 1938 (1356H), komisi perguruan NU

berhasil melahirkan reglement tentang susunan madrasah yang harus dijalankan mulai tanggal 2 Muharram 1357H. adapun susunan madrasah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Madrasah awaliyah dengan lama belajar 2 tahun
- b) MI dengan lama belajar 3 tahun
- c) Mts dengan lama belajar 3 tahun
- d) Madrasah mu'allimin wustha 2 tahun
- e) Madrasah mu'allimin 'uliyah 3 tahun.⁴⁴

Kurikulum yang menjadai acuan dalam proses PBM di madrasah tersebut mengacu kepada ketentuan PB NU bagian pendidikan dan pengajaran yang dikenal dengan ma'arif. Selanjutnya NU setelah proklamir kemerdekaan RI mengeluarkan resolusi jihadnya yang isinya mengajak umat islam untuk melakukan jihad dalam mempertahankan tanah air yang telah merdeka, dan hukumnya fardhu ain. Kenyataan ini disambut baik oleh umat Islam. Dengan

⁴⁴ Hasbullah, h.109 dan lihat juga dalm Mahmud Junus, h. 242

dorongan yang disampaikan oleh NU membuat semangat kaum muslimin dalam mempertahankan kemerdekaan semakin tinggi. Terlebih mereka yang berasal dari pesantren. Hal inilah yang pernah di ungkapkan oleh presiden Suharto bahwa ia yakin perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tidak terlepas dari perjuangan umat muslim terutama ulama dengan konsep jihadnya.

3. Ekonomi

Keterlibatan Nu dalam bidang ekonomi lebih dikerucutkan pada bidang perdagangan, dalam hal ini telah ditentukan dalam peraturan dasar dalam orrganisasi NU ini , dengan mendirikan badan-badan perdagangan. Dalam bidang dagang ini tidaklah suatu hal yang mengherankan karena ulama dari kalangan pesantren ini merupakan petani, pedagang dan saudagar. Mereka hidup bukan dari gaji mengajar tapi mereka yang menghidupkan pendidikan. Mereka yang membiayai pendidikan dan pengajaran dengan hasil pergagangan. Mereka

meliht sosok nabi yang memiliki dua profesi yaitu pedagang dan pendidik.

Langkah pertama dalam perdagangan ini ialah keputusan Pada tahun 1930 untuk mendirikan suatu lujnah waqfiah pada tiap cabang NU bertugas mengurus waqaf. Walau wakaf bukan dianggap sebagai suatu perusahaan, namun dalam pengurusannya serta transaksi segi komersialnya dapat menonjol (uang penjualan tanah waqaf), sungguhpun uang tersebut diperuntukan untuk kepentingan umat. Dalam tahun 1937 NU mendirikan badan khusus, waqfiah NU, yang boleh “ membeli, mempunyai atau menguasai (menjadi nazir) tanah-tanah wakaf, berdasar atas ass islam, bermazhab salah satu dari empat iman⁴⁵

Dalam masalah komersial disarankan dalam tahun 1937 oleh ketua NU , kiyai mahfudz Siddiq , hendaknya didirikan badan-badan koperassi yang disebut dengan *syirkah*

⁴⁵ Deliar Noer, op cit., h. 252

muawamah dicanag-cabang syirkah/perusahaan di Surabaya, Singosari.⁴⁶

Dalam perjalanannya NU melakukan dagang dengang dengan mengimpor barang-barang dari luar negeri seperti barang dari jepang berupa barang pecah belah dan sepeda dari singapura yang menggunakan symbol NU atau mungkin banyak juga barang-barang lain yang dalam literature tidak ditemukan secara rinci mengenai bisnis dan dagang yang dilakukan oleh organisasi NU ini. Namun dari gambaran di atas sudah menunjukkan bahwa NU bukan hanya bergerak dibidang kegamaan saja tapi juga mengeluti bbidang lain dari luar agama tersebut. Sangat jelas kelihatan bahwa elemen-elemen dari sendi kehidupan ini inginya umat islam yang menguasai sehingga umat muslim ini bisa Berjaya seperti berjayanya pada masa Rasulullah.

⁴⁶ Deliar Noer, h. 253

D. Kesimpulan

Lahirnya NU merupakan keinginan ulama untuk terus meningkatka dan menyebarkan luasakan ajaran dan pendidikan Islam. Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) Didirikan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis), Jumlah warga Nahdlatul Ulama atau basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta orang, dari beragam profesi. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial-ekonomi memiliki masalah yang sama, selain itu mereka juga sangat menjiwai

ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah dan pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Taba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Abu Bakar Atjeh (Ed), *Sejarah Hidup K.H.A.Wachid Hasyim dan Karangannya Tersiar*, Panitia Buku Peringatan, Jakarta, 1957
- Abu Bakar ad-Dimyati, *I'annah at-Talihin*, juz IV, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, al-Qahirah, tt
- Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan Kiai Wahab Chasbullah*, Penerbit Baru, Bandung, 1970,
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986
- Mahrus Irsyam, *Ulama dan Politik Upaya mengatasi Krisis*, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984
- Muhammad, Hilmy Sulthan Fatoni, *Identitas Islam Indonesia*., Elsas, Jakarta : 2004
- Anonim, *Ahkam al-Fuqaha*, Thoa Putra, Semarang, 1960
- Abdurrahman Wahid “Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia dewasa ini”. Prisma no 4 April 1984
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 1900-1942., LP3ES, Jakarta, 1980

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1999

Junus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta: 1979, h, 239-240

^Karim, Gafar, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia*, cet, I . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Kamal, Mustafa Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, cet. I Yogyakarta: LPPI, 2000

M.Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1994

Mahrus Irsyam, *Ulama dan Politik Upaya mengatasi Krisis*, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984,

Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, LKS Yogyakarta, 1994

Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Su'ud Abu, *islamologi Sejarah, Ajaran dan peranannya dan perdaban Umat Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003

Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdhatul Ulama* Jakarta: Sek. Jen. PBNU, 1999

Shodik, Mohamad, *Gejolak Santri Kota: Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, cet. I Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000

